

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis mengutip pendapat dari beberapa ahli dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Tinjauan Geografi

Menurut Bintarto dalam Sumadi (2003:4) geografi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala muka bumi dan peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik yang fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi dan kewilayahannya. Sedangkan penelitian ini merupakan kajian geografi sosial. Menurut Budiyo (2003:30) bahwa, sebagai dasar pokok dalam mempelajari geografi sosial, yaitu meliputi 1) Manusia, baik sebagai individu dan kelompok. 2) Lingkungan alam (sebagai tempat tinggal dan aktivitas) 3) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam, dan manusia dengan manusia.

Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji hubungan antara penduduk dengan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas manusia dengan lingkungannya terutama dalam bidang pertanian sebagai tempat mata pencahariannya.

2. Bantuan Sosial

2.1 Pengertian Bantuan Sosial

Menurut Kementerian Sosial (2011:15) bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah.

Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 (2010:79) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 (2010:79) menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dengan perkembangan sosial ekonomi suatu negara, program bantuan sosial yang semula hanya berbentuk hibah saja berubah orientasinya menjadi program yang lebih memberikan manfaat berkelanjutan melalui bantuan pemberdayaan atau stimulan agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri kecuali bagi sasaran program yang memang sudah tidak potensial sama sekali seperti lanjut usia yang jompo, miskin terlantar dan lain-lain. Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemberian bantuan sosial kepada kepala keluarga miskin dengan membentuk kelompok kerja yang bergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), diharapkan dengan model bantuan tersebut

dapat terentaskan kemiskinan. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat atau keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya (Kementrian Sosial, 2011:9). Berdasarkan uraian tersebut, maka bantuan sosial yang digulirkan di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yaitu 28 ekor anak sapi, yang dibagikan kepada tujuh Kelompok Usaha Bersama (Hasil wawancara pada tanggal 20 Desember 2011). Sehingga setiap kelompok yang terdiri dari 10 orang anggota mendapatkan bagian empat ekor sapi yang akhirnya dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan.

2.2 Tujuan Program Bantuan Sosial

Program bantuan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, dalam hal: penghasilan, kepemilikan harta benda, perumahan, pendidikan, ketrampilan dan kesehatan. Atas dasar kondisi tersebut agar dapat diupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya, meningkat kemampuan permodalannya dan pengembangan usaha agar terwujud kesejahteraan tanggungan keluarganya (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung, 2003:7).

Sehingga bantuan sosial yang digulirkan kepada kepala keluarga miskin buruh ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan tanggungan keluarga (Hasil wawancara pada tanggal 20 Desember 2011)

3. Pendapatan Keluarga

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1985:326), membedakan pendapatan menjadi 2, yaitu:

1. Pendapatan pokok, yaitu pendapatan utama yang diperoleh dari suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

2. Pendapatan tambahan/sampingan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan yang digunakan untuk kepentingan keluarga.

Berdasarkan pendapat tersebut, pendapatan keluarga miskin penerima bantuan sosial di Desa Totokaton diperoleh dari hasil pekerjaan pokok sebagai buruh tani dan pekerjaan sampingan. Sedangkan pendapatan dari bantuan sosial didapat dari hasil usaha pengembangan dan pemanfaatan bantuan tersebut yang dihitung dalam satuan rupiah dalam jangka waktu satu tahun (Hasil wawancara pada tanggal 20 Desember 2011).

4. Jenis Usaha Pemanfaatan Bantuan Sosial

Jenis usaha ekonomi produktif dalam satu kelompok dapat bermacam-macam/bervariasi tergantung peluang pasar, potensi lokal dan keterampilan yang dimiliki masing-masing anggota KUBE (Kementerian Sosial, 2011:26). Penerima bantuan sosial memiliki wewenang dalam menentukan jenis usaha dalam pemanfaatan bantuan sosial sesuai keahlian dan potensi lokal. Beberapa jenis usahanya meliputi sektor pertanian maupun nonpertanian. Hal ini mengacu pada teori menurut Kementerian Sosial (2011:1) bahwa kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikembangkan meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, industri rumah tangga, jasa dan kegiatan ekonomi lainnya.

Dari uraian tersebut, jenis usaha yang harus dilakukan oleh kepala keluarga penerima bantuan sosial yaitu beternak sapi melihat bantuan sosial yang diberikan berupa 28 ekor sapi. Namun dalam realisasinya terdapat penerima bantuan sosial yang mengembangkan usahanya dengan jenis usaha lain (Hasil wawancara pada tanggal 20 Desember 2011). Jenis usaha yang dilakukan dalam mengembangkan bantuan sosial tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan bantuan sosial untuk usaha di sektor pertanian yang meliputi peternakan, perikanan, kehutanan.
- b. Pemanfaatan bantuan sosial untuk usaha di sektor nonpertanian seperti bidang, jasa dan industri rumah tangga.

3. Sistem Kerja

Sistem kerja adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). Menurut Kementerian Sosial, (2011:11) melalui sistem KUBE, akan meningkatkan tanggung jawab melalui sistem kontrol internal diantara anggota sehingga menjamin optimalisasi pencapaian hasil, pelestarian dan keberlangsungan program.

Dari uraian tersebut maka sistem kerja yang seharusnya dilakukan oleh kepala keluarga penerima bantuan sosial yaitu sistem kerja kelompok. Namun dalam realisasinya terdapat penerima bantuan sosial mengembangkan usahanya dengan sistem kerja mandiri (Hasil wawancara pada tanggal 20 Desember 2011). Sistem kerja yang digunakan dalam mengembangkan bantuan sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sistem kerja kelompok yaitu bantuan sosial dikembangkan bersama-sama dengan anggota kelompok yang telah dibentuk sebelumnya.
- b. Sistem kerja mandiri yaitu bantuan sosial dibagi rata dengan anggota kelompok kemudian dikembangkan secara mandiri.

c. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum

Pemenuhan kebutuhan pokok minimum adalah pemenuhan kebutuhan yang meliputi sembilan bahan pokok setiap individu perkapita. Menurut Totok Mardikanto (1990:23) berpendapat bahwa kebutuhan 9 bahan pokok minimum per kapita per tahun meliputi yaitu beras 140 kg, ikan asin 15 kg, gula pasir 3,5kg, tekstil kasar 4 meter, minyak goreng 6 kg, minyak tanah 60 liter, garam 9 kg, sabun 20 kg, dan kain batik 2 potong. Berdasarkan pendapat tersebut maka ada sembilan bahan pokok minimum yang harus dipenuhi setiap keluarga. Untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga miskin di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dalam Tabel. 3.

Tabel 3. Rincian Kebutuhan Pokok Minimum Yang Dibutuhkan Setiap Orang Pertahun Menurut Totok Mardikanto di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Bulan Januari 2012

No	Jenis kebutuhan pokok minimum	Kebutuhan pokok perkapita pertahun	Harga per Kg/Lt/Mtr/Pt	Total kebutuhan
1	Beras	140 Kg	Rp 7000,00	Rp 980.000,00
2	Ikan Asin	15 Kg	Rp 15.000,00	Rp 225.000,00
3	Gula Pasir	3.5Kg	Rp 10.000,00	Rp 35.000,00
4	Tekstil Kasar	4 Mtr	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00
5	Minyak Tanah	60 Ltr	Rp 10.000,00	Rp 600.000,00
6	Minyak Goreng	6 Kg	Rp 10.000,00	Rp 60.000,00
7	Garam	9 Kg	Rp 2.000,00	Rp 18.000,00
8	Sabun	20 Kg	Rp 15.000,00	Rp 300.000,00
9	Kain Batik	2 Ptg	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00
Jumlah				Rp 2.438.000,00

Sumber: Berdasarkan harga penjualan rata-rata pada saat penelitian di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah bulan Januari 2012.

Adapun kriteria pemenuhan kebutuhan pokok minimum disesuaikan dengan harga 9 bahan pokok dibedakan menjadi :

1. Terpenuhi apabila pengeluaran per rumah tangga per tahun lebih besar atau sama dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum per rumah tangga per tahun. Dihitung dengan cara standar pemenuhan kebutuhan pokok minimum per kapita per tahun dikalikan dengan banyaknya jiwa dalam rumah tangga.
2. Tidak terpenuhi apabila pengeluaran per rumah tangga per bulan lebih kecil dari pemenuhan kebutuhan pokok minimum per rumah tangga per tahun. Dihitung dengan cara standar pemenuhan kebutuhan pokok minimum per kapita per tahun dikalikan dengan banyaknya jiwa dalam rumah tangga.

Sedangkan pemenuhan kebutuhan pokok minimum pada setiap orang perkapita di Desa Totokaton tahun 2012 sebesar Rp 2.438.000,00 pertahun atau Rp 203.200,00 perbulan. Maka pemenuhan kebutuhan pokok minimum pada setiap orang akan terpenuhi apabila pengeluarannya lebih besar atau sama dengan Rp 2.438.000,00 pertahun atau Rp 203.200,00 perbulan dan tidak terpenuhi apabila pengeluarannya lebih kecil dari Rp 2.438.000,00 pertahun atau Rp 203.200,00 perbulan.

d. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan diperkenalkan dengan tolak ukur kapabilitas kemiskinan *Capability Poverty Measure* (CPM) yang mengukur tiga segi yaitu pertama ketidakmampuan hidup sehat dan bergizi, yang tercermin pada anak balita yang kurang berat badannya, kedua ketidakmampuan melahirkan bayi secara sehat seperti terungkap pada tingkat kelahiran yang tidak diladeni oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan

yang ketiga adalah ketidakmampuan untuk mengenyam pendidikan seperti terukur pada perempuan di atas 15 tahun yang buta huruf. (Emil Salim, 2010:257).

Kemiskinan menurut BPS (2010:7) yaitu bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kkal per kapita. Menurut Kementerian Sosial (2011:14) kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja (Djoko Sudantoko dan Muliawan Hamdani, 2009:44).

Berdasarkan Totok Mardikanto (1990:24), berdasarkan patokan tersebut, perhitungan garis kemiskinan dilakukan dengan membandingkan antara nilai kebutuhan sembilan pokok minimum tersebut dengan pendapatan absolut per kepala per tahun. Klasifikasinya adalah : < 75 % miskin sekali, 75%-125% miskin, 125%-200% hampir miskin dan >200% tidak miskin. Sehingga dalam menilai tingkat garis kemiskinan menggunakan perbandingan nilai kebutuhan Sembilan bahan pokok dengan pendapatan.

b. Pengentasan Kemiskinan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Menurut Mikkelsen dalam Trimo Yulianto (2005:51) pengentasan kemiskinan mencakup : 1) Membuka kesempatan ekonomi kepada golongan miskin dengan melalui program padat karya dan meningkatkan produktivitas usaha kecil dan petani kecil; 2) Investasi sumber daya manusia terutama perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan; 3)Pemberian jaring pengaman untuk melindungi mata pencaharian.

Berdasarkan uraian tersebut pengentasan kemiskinan yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penelitian ini yaitu menggulirkan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai sarana memberdayakan masyarakat miskin agar mampu untuk melakukan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan untuk mengetahui jumlah keluarga miskin yang terentaskan yaitu dengan membandingkan antara pendapatan dengan standar nilai pemenuhan kebutuhan pokok minimum yang harus dipenuhi dengan kriteria sebagai berikut :

- Miskin sekali jika kebutuhan pokok terpenuhi $< 75\%$
- Miskin jika kebutuhan pokok terpenuhi $75\%-125\%$.
- Hampir miskin jika kebutuhan pokok terpenuhi $>125\%-200\%$.
- Tidak miskin jika kebutuhan pokok terpenuhi $>200\%$

e. Buruh Tani

Buruh atau karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor perusahaan dengan menerima upah atau gaji baik berupa uang maupun barang : pegawai negeri/swasta, buruh tani, dan sebagainya (Basir Bathos, 1990 : 19). Buruh tani didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan suatu pekerjaan di sawah atau ladang pertanian dengan tidak menanggung risiko

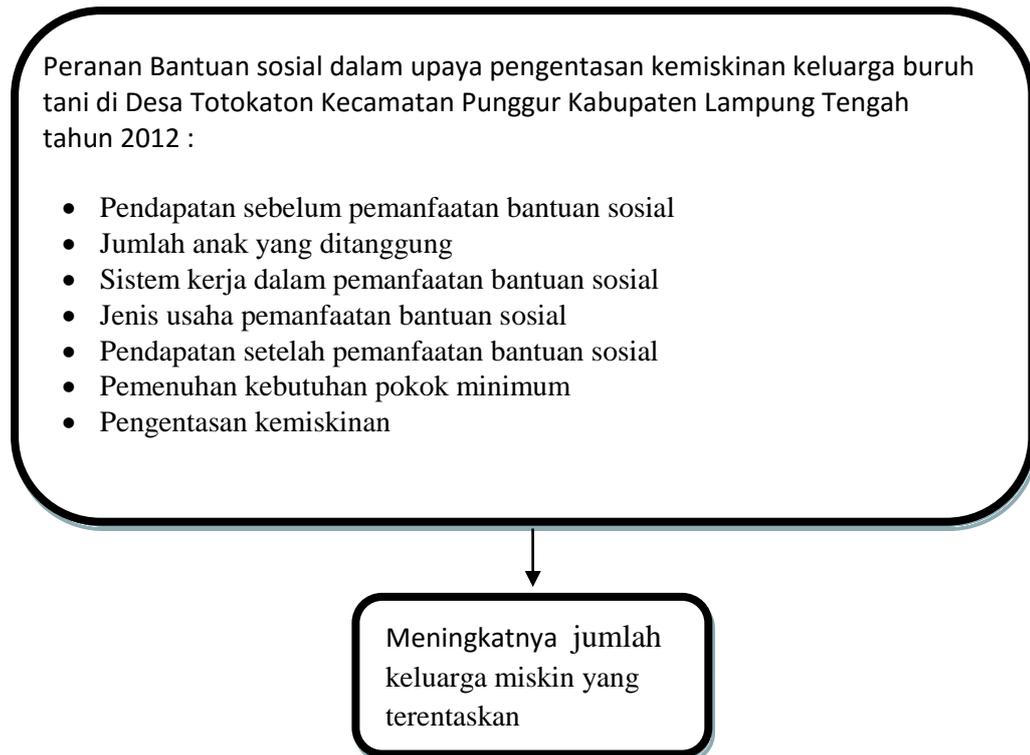
terhadap hasil panen dan bertujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan. Sehingga dalam penelitian ini, kepala keluarga yang mendapatkan bantuan sosial merupakan buruh tani sawah irigasi yang bekerja dengan standar upah yaitu Rp 30.000,00 perhari atau Rp 20.000,00 persetengah hari pada musim tanam namun pada musim panen upah dihitung dengan sistem *bawon 71*. Maksudnya apabila buruh memanen 7 kwintal padi petani maka upah yang didapat sebesar 1 kwintal padi kemudian dikonversikan dengan satuan rupiah (Hasil Wawancara pada tanggal 20 Desember 2011).

B. Kerangka Pikir

Keberadaan bantuan sosial dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan alternatif perluasan lapangan pekerjaan sebagai upaya meningkatkan pendapatan bagi kepala keluarga miskin buruh tani penerima bantuan sosial di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Dengan latarbelakang keahlian yang beragam maka jenis usaha dalam pemanfaatannyapun beragam.

Selain itu sistem kerja yang dilakukan dalam memanfaatkan bantuan sosial juga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan usaha. Hal ini mendorong perbedaan pendapatan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok minimum anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari pemanfaatan bantuan sosial tersebut. Selanjutnya jumlah anak dan tanggungan keluarga yang dimiliki oleh kepala keluarga buruh tani akan mempengaruhi tingkat kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga

Sehingga dengan perbandingan tingkat pendapatan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga dapat dilihat seberapa besar keluarga yang terentaskan dari kemiskinan setelah adanya bantuan sosial. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut:



Gambar 1. Bagan kerangka pikir